

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa adalah struktur pemerintahan terbawah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan di tingkat desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mozin & Isa, 2023).

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Desa Gembongan sebagai salah satu unit pemerintahan di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam mengelola dan menyediakan layanan publik yang merata dan berkualitas bagi penduduknya. Tata kelola aparatur pemerintah desa memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Konsep tata kelola yang baik tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga memperhatikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi tata kelola yang ideal di tingkat desa.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan administrasi, yang merujuk pada organisasi dan pelaksanaan tugas-tugas oleh pejabat negara pada berbagai tingkatan dan jabatan. Administrasi ini menekankan peran Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan administrasi ini harus dimulai dengan mengubah cara para aparatur mengelola sumber daya manusia (SDM). Proses ini sangat penting untuk menghasilkan pegawai yang memiliki

integritas, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola administrasi dengan baik. (Ashari, E., 2010).

Bagian dari struktur pemerintahan desa adalah perangkat desa, termasuk sekretaris desa dan staf lainnya, yang memiliki peran krusial dalam kemajuan bangsa melalui pembangunan di tingkat desa. Kepala desa bertanggung jawab atas manajemen perangkat desa, yang merupakan anggota pemerintahan desa. Komposisi dan nama jabatan perangkat desa dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial-budaya di masyarakat lokal, seperti kepala urusan, kepala seksi, dan tokoh wilayah seperti kepala dusun yang berada dalam struktur setiap pemerintahan desa. Kualitas pelayanan publik di tingkat desa sangat bergantung pada tata kelola dan kapasitas aparatur desa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aparatur desa direkrut, dilatih, dan dikelola dengan baik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Pada awalnya, Pemerintahan Desa Gembongan menghadapi berbagai masalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa sering bertindak sewenang-wenang, dan tidak ada kejelasan dalam jam kerja, yang mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat desa. Meski demikian, sinergi antara Kepala Desa dan perangkat desa tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa ketidaksepahaman yang menghambat operasional desa. Namun, Kepala Desa terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

Desa Gembongan masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur desa. Tantangan ini mencakup rekrutmen, pelatihan, dan seleksi aparatur desa yang transparan dan akuntabel. Proses ini penting untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik. Proses seleksi yang objektif dan adil juga penting agar hanya individu yang memenuhi kualifikasi yang menempati posisi strategis. Kendala seperti kurangnya transparansi,

nepotisme, dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat optimalisasi proses-proses tersebut (Supriyatno, 2023).

Dilansir dari laman Radar Mojokerto, Pemerintahan Desa Gembongan berkomitmen untuk siap melayani masyarakat selama 24 jam. Kepala Desa Gembongan menjelaskan bahwa banyak masyarakat tidak bisa mengurus surat-surat karena berbenturan dengan jadwal kerja, sehingga baru bisa mengurusnya pada malam hari. Dengan mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor industri, pemerintah desa memberikan layanan selama 24 jam atau di luar jam operasional kantor desa, khususnya untuk kebutuhan administrasi dan layanan kesehatan. Layanan transportasi desa untuk keperluan kesehatan, yang sudah diterapkan sejak tahun 2020, juga menjadi andalan masyarakat. Kepala Desa Gembongan berupaya agar pemerintah desa selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan terus memperbaiki situs web desa agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor desa. Namun, kurangnya loyalitas perangkat desa dalam program pembaruan sistem website desa sedikit menghambat proses pengerjaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diberikan, masalah yang harus diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Gembongan ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat optimalisasi tata kelola aparatur pemerintahan desa dalam pelayanan publik di desa Gembongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aparatur pemerintah desa Gembongan mengelola pelayanan publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, :

- a) Manfaat teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana aparatur pemerintah desa mengelola pelayanan publik di Desa Gembongan.

b) Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana aparatur pemerintah desa mengelola pelayanan publik di Desa Gembongan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, fokus penelitian ini adalah bagaimana aparatur pemerintah desa mengelola pelayanan publik di Desa Gembongan. Oleh karena itu, peneliti hanya akan membahas masalah yang berkaitan dengan aparatur pemerintah desa.